

ABSTRAK

Berdasarkan subjek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Subyek hukum yang berbentuk perseorangan dapat berasal dari Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Salah satu badan hukum yang dapat menguasai tanah adalah Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah selain sebagai subjek hukum hak atas tanah, juga berwenang mengelola sendiri barang milik daerah salah satunya dalam bentuk sewa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seperti halnya kasus yang terjadi di Provinsi Bali yakni pemberian Hak Pakai atas tanah yang merupakan tanah negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun Gedung Kampus Universitas Hindu Indonesia berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 26. Tanah di Desa Penatih yang saat ini dimanfaatkan untuk lokasi Kampus UNHI merupakan tanah aset penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dan meminta agar Pihak UNHI melakukan permohonan sewa atas sertipikat Hak Pakai nomor 26 di Desa Penatih.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Hak Pakai, Sewa

ABSTRACT

Based on the legal subject, the right to land may be owned or controlled by an individual or legal entity. The legal subject in the form of an individual may come from a citizen of Indonesia or a foreigner domiciled in Indonesia. One of the legal entities that can control the land is the Local Government, namely the Provincial Government and District / City Government. The authority of the Local Government other than as the subject of land title law, is also authorized to self-manage one's own property in the form of a lease of land as stipulated in Government Regulation No. 27 of 2014 on the Management of State / Regional Property. As with the case that occurred in the Province of Bali namely the granting of the Right to Use on land which is state land granted to the Regional Government of the Province of Bali which was then used and utilized to build the Indonesian Hindu University Campus Building based on the Right to Use certificate No. 26. Land in the village of Penatih which is currently used for the location of the UNHI Campus is an asset land for the control of the Bali Provincial Government and requests that the UNHI Party apply for a lease on the Right to Use certificate No. 26 in the Penatih Village.

Key Words : local government, right to use, lease